



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,  
BPJS KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 9 Juni 2014
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan Persiapan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang dimulai 1 Juli 2015; 2. Perubahan Sistem Keuangan dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan pasca transformasi 1 Januari 2014.
Ketua Rapat	: Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. Direktur BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran; B. Anggota Komisi IX DPR RI orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan persiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Juli 2015 terkait dengan pelayanan program jaminan sosial, peningkatan jumlah kepesertaan, peningkatan pengelolaan keuangan dan investasi Dana Jaminan serta peningkatan sumber daya manusia termasuk kepada pekerja outsourcing.
2. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan akses dan pelayanan kepada pekerja formal dan informal serta memberikan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada peserta untuk kembali bekerja (return to work) atau wirausaha melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelayanan jaminan sosial melalui program bantuan perumahan, beasiswa pendidikan dan program lain antara lain pelayanan antar jemput kepada peserta serta mempersiapkan program jaminan pensiun kepada pekerja.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan dengan menerbitkan ketentuan dan peraturan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terkait manfaat dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan dari unsur pekerja formal dan birokrasi.
5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam RDP ini, selambat-lambatnya 23 Juni 2014.

**Rapat diakhiri pukul 13.00 WIB**

**KETUA RAPAT,**



**Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si**